

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tinjauan atau referensi yang digunakan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian yang memiliki tema sama dalam permasalahan yang diangkat. Maka dari itu, penelitian terdahulu menjadi sangat penting bagi seorang peneliti dalam melakukan sebuah penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat memberi atau menjadi sebuah karya ilmiah yang menghasilkan sesuatu yang baru bagi peneliti, akademik, masyarakat umum dan pemerintah.

Berikut ialah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti / Judul	Hasil	Relevansi
1.	Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Melalui Home Industry di Dusun Pelamadu, Desa Sriharjo, Kec. Imogiri, Kab. Bantul, D.I.Y, Eli Yuliawati, Skripsi, Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Univeritas Negeri	kenaikan rata-rata pendapatan perempuan pemilik sekaligus pengelola home industry setelah adanya pemberdayaan sebesar 97,63 % dan perubahan proporsi pendapatan perempuan dari hasil home industry dalam menunjang peningkatan pendapatan keluarga sebelum dan setelah adanya pemberdayaan per bulan naik rata-rata	Adapun relevansinya dengan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan perempuan dan sama-sama bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut.

	Yogyakarta 2012. <sup>20</sup>	sebesar 1,4% yaitu dari 94,30% menjadi 95,70%. Dengan demikian adanya pemberdayaan melalui home industry mampu menunjang peningkatan pendapatan keluarga dengan proporsi sebesar 95,70 %. Artinya 95,70 % persen pendapatan keluarga berasal dari home industry yang dimiliki dan dikelola perempuan.	
2.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sekolah Perempuan (Studi Terhadap PNPM Peduli-Lakpesdam NU Bantul), Mami Suciati, Skripsi, Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 2014. <sup>21</sup>	1). Proses Pemberdayaan di sekolah perempuan meliputi tahap pendataan meliputi pendataan, pengelompokan, penambahan wawasan, dan penyapihan. Tahap pendataan meliputi pendataan peserta, pendamping dan identifikasi lokasi. Tahap pengelompokan yaitu peserta didampingi untuk menganalisis potensi diri dengan SWOT. 2). Hasil pemberdayaan di sekolah perempuan baru berupa perubahan sikap dalam menjalankan usahanya. Hasil pemberdayaan belum cukup mampu meningkatkan perekonomian keluarga maupun masyarakat. 3). Ada beberapa kendala	Adapun relevansinya dengan penelitian adalah sama-sama meneliti pemberdayaan perempuan melalui sekolah perempuan yang merujuk rumusan masalah yang sama yaitu tentang proses, hasil dan kendala. Yang membedakan ialah obyek penelitiannya dan tempat penelitiannya. Kemudian hal yang membedakan secara konsep ialah penelitian pemberdayaan yang dilakukan oleh Mami Suciati ini bersifat Top Down, artinya program pemberdayaan tersebut merupakan program pemerintah, kemudian masyarakat hanya tinggal menjalankan. Sedangkan

<sup>20</sup>Yuliawati, E.(2012).*Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Melalui Home Industry di Dusun Pelamadu, Desa Sriharjo, Kec. Imogiri, Kab. Bantul, D.I.Y.* Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Univeritas Negeri Yogyakarta.(Skripsi).

<sup>21</sup>Suciati, M.(2014).*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sekolah Perempuan (Studi Terhadap PNPM Peduli-Lakpesdam NU Bantul).*Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.(Skripsi).

		dalam pemberdayaan di sekolah perempuan antara lain: kendala akses jalan, permodalan (Uang), kurangnya motivasi peserta, peserta menjadi ketergantungan dengan adanya uang saku, dan kurang sesuanya bantuan alat berupa mesin penetas dengan potensi peserta yang telah dikelompokkan.	pemberdayaan yang diteliti oleh penulis bersifat Bottom Up artinya pemberdayaan ini swadaya masyarakat atau inisiatif masyarakat sendiri.
3.	Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Perdesaan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan, Hastuti dan Dyah Respati, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. <sup>22</sup>	Sistem nilai menempatkan perempuan cenderung pada kegiatan domestik dan non produktif, perempuan lebih berperan di rumah tangga katimbang laki-laki. Keterjangkauan kurang menguntungkan karena ketersediaan infrastruktur transportasi terbatas. Pemanfaatan sumberdaya perdesaan strategis banyak dikuasai laki-laki katimbang perempuan. Perempuan miskin kurang mendapat prioritas peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pendidikan dan pendapatan relatif rendah, kurang memiliki kesempatan akses dan kontrol terhadap sumberdaya. Sumberdaya perdesaan meliputi lahan, hutan, modal, infrastruktur, serta barang berharga dan rumah. Diperlukan model pemberdayaan perempuan miskin	Relevansi dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti pemberdayaan perempuan, akan tetapi penelitian tersebut dikhususkan pada model pemberdayaannya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis fokus pada proses, hasil dan kendala dari pemberdayaan perempuan melalui sekolah perempuan.

<sup>22</sup>Hastuti & Respati, D. *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Perdesaan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan*. Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.(Jurnal).

		dengan memperhatikan keterlibatan perempuan agar secara aktif mampu berpartisipasi dalam pemanfaatan sumberdaya perdesaan.	
--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan yang mendasar ialah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan di masyarakat. Kemudian perbedaan yang nampak ialah tentang sifat, model dan cara dalam mengangkat sebuah penelitian. Seperti dipaparkan dalam rumusan masalah bahwa peneliti mengambil tiga poin besar dalam melakukan penelitian. pertama, tentang bagaimana proses berdirinya pemberdayaan melalui sekolah perempuan, kedua, bagaimana kendala dalam pemberdayaan melalui sekolah perempuan dan ketiga bagaimana hasil pemberdayaan melalui sekolah perempuan.

## **2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (empowerment), berasal dari power (kekuasaan atau keberdayaan) karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka

pikirkan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>23</sup>

Pemberdayaan menurut Merriam Webster diartikan sebagai memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Pengertian kedua sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.<sup>24</sup>

Istilah pemberdayaan seringkali berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi yaitu dengan meningkatkan kemampuan ekonomi individu yang merupakan prasyarat pemberdayaan. Tetapi lebih dari sekedar hal yang berkaitan dengan ekonomi, pemberdayaan merupakan tindakan usaha perbaikan dari segala aspek termasuk hal yang berkaitan dengan sosial, budaya, politik, psikologi baik secara individual maupun kolektif.<sup>25</sup>

### **2.2.1 Metode Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut kamus sosiologi metode memiliki dua arti pertama, tipe penalaran yang dipergunakan bagi pemeriksaan dan penilaian. Kedua, cara yang dianjurkan untuk melaksanakan prosedur.<sup>26</sup> Metode pemberdayaan masyarakat harus selalu mempertimbangkan waktu penyelenggara yang tidak terlalu mengganggu kegiatan atau pekerjaan pokok masyarakat. Waktu penyelenggara sesingkat mungkin dan harus lebih banyak menggunakan alat peraga. Metode pemberdayaan yang dapat diterapkan dalam memberdayakan masyarakat yaitu:

---

<sup>23</sup> Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama. Hal 57-58

<sup>24</sup> Sunartiningsih, Agnes. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Aditya Media. Hal 148-149

<sup>25</sup> Ibid, Hal 148

<sup>26</sup> Mustofa, B & Elisa Vindi Maharani. (2011). *Kamus Lengkap Sosiologi*. Jogjakarta: Panji Pustaka. Hal 186.

- a. Metode pendidikan formal ( diskusi, pengajian, keterampilan dan pengetahuan umum).
- b. Metode pendidikan Non-formal (studi banding, belajar aksi kritis dan menggelar pameran).

Dalam memberdayakan masyarakat metode yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan. Artinya metode yang digunakan berbeda dengan pendidikan formal yang telah memiliki program yang dibakukan. Setiap kegiatan pendidikan non formal atau kegiatan pemberdayaan masyarakat harus selalu menyesuaikan dengan penerima manfaat. Dengan demikian, metode yang digunakan harus memperhatikan karakteristik penerima manfaat, sumberdaya yang tersedia atau yang dapat dimanfaatkan serta keadaan lingkungan termasuk tempat dan waktu diselenggarakan pemberdayaan masyarakat tersebut.<sup>27</sup>

### **2.2.2 Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut kamus sosiologi Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *statos* artinya tentara agar memimpin, *strategos* artinya kiat atau cara memimpin tentara. Selanjutnya strategi dapat diartikan sebagai kiat untuk mencapai suatu tujuan.<sup>28</sup> Sedangkan strategi pengembangan masyarakat adalah usaha yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tujuan.<sup>29</sup> Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang penting serta berkaitan dengan pelaksanaan dan

---

<sup>27</sup>Mardikato, T dkk. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat : dalam perspektif kebijakan publik/ Mardikanto*. Bandung: Alfabeta. Hal 212.

<sup>28</sup>Mustofa, B & Elisa Vindi Maharani.(2011). *Kamus Lengkap Sosiologi*. Jogjakarta: Panji Pustaka. Hal 304.

<sup>29</sup>Muslim, A. 2012. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. (Yogyakarta, Samudra Biru).hal 71.

mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mensukseskan persaingan agar dapat tercapai dengan baik.<sup>30</sup>

Pemilihan strategi dalam memberdayakan perempuan sangat penting untuk menuju keberhasilan program. Keberhasilan program merupakan tujuan dari sebuah perencanaan. Namun, ada faktor penghambat atau kendala mengapa perempuan terlupakan. Berikut adalah kendala dalam pemberdayaan perempuan antara lain:

a) Kendala Struktur Sosial

Dalam hal ini perempuan masih diperhadapkan dengan laki-laki, bahwa laki-laki berada pada wilayah publik sedangkan perempuan di wilayah domestik. Oleh karena itu, kontrol budaya perempuan masih sangat kuat.

b) Kendala Minoritas Unik

Posisi lemah perempuan kurang disadari oleh perempuan sendiri. Di samping itu, ada juga kelompok-kelompok perempuan yang sadar meskipun banyak perempuan lain yang khawatir. Ada juga yang melihat terdapat kelompok perempuan yang meresahkan, dan pada saat itu pula ada yang memandang tidak meresahkan.

c) Kendala Mitos

Mitos telah mengembeded sekian lama dalam diri perempuan sehingga perempuan menerima kenyataan dirinya ter subordinasi, misalnya mitos tulang rusuk, menstruasi dan sebagainya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Mardikanto, T. 2010. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat Acuan Bagi Para Birokrasi Akademisi, Praktisi, dan Peminat/Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat*. ( Fakultas Pertanian UNS Press). Hal 194.

<sup>31</sup>Suhartini, Rr, "Dimensi Jender Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Rawan Longsor", dalam Imam Khambali, A. Halim dkk. 2005. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta, PT. LKIS Pelangi Aksara), hal 141.

### 2.2.3 Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Tahap adalah langkah untuk mencapai suatu yang ditargetkan . Menurut Tim Delivery yang dikutip Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato dalam buku Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik,<sup>32</sup> tahap-tahap kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan proses seleksi, sosialisai pemberdayaan, proses pemberdayaan sampai dengan pemandirian masyarakat. Adapun proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, yaitu:

- a) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut.
- b) Penyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian.
- c) Menerapkan rencana kegiatan kelompok.

### 2.2.4 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang berdaya atau powerless, sehingga tidak mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Hal itulah yang dianggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupannya tidak sejahtera.

---

<sup>32</sup> Mardikanto, T, dkk. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat : dalam perspektif kebijakan publik/* Mardikanto. Bandung : Alfabeta. Hal



- d) Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola pembangunan, masyarakat perlu diberdayakan atau empowerment. Menurut pendapat Korten dalam buku yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya yang dikutip oleh Soetomo, memahami power tidak cukup dari dimensi distributif akan tetapi juga dari dimensi generatif. Dalam dimensi distributif, berdasarkan terminologi personal, power dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain.<sup>33</sup>

### 2.3 Tahapan Pengembangan Masyarakat

Tahapan pengembangan masyarakat adalah cara bagaimana agar masyarakat berkembang. Tahapan pengembangan masyarakat sendiri memiliki tujuh bagian, diantaranya:

#### 1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan ini memiliki dua bagian didalamnya, yaitu tahap persiapan petugas dan tahap persiapan lapangan. Persiapan petugas merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat dengan pendekatan non-direktif. Persiapan petugas ini terutama diperlukan untuk menyamai persepsi antar anggota tim agen perubah (*change agent*). Mengenai pendekatan apa yang dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahap persiapan lapangan, petugas (*community worker*) pada awalnya melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang dijadikan sasaran, baik dilakukan secara informal maupun secara formal.

---

<sup>33</sup>Soetomo.(2015). *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 88-89

## 2. Tahap Mapping Masalah

Proses Mapping Masalah yang dilakukan disini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan = *felt needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Di samping itu, dalam proses penelitian (*assessment*) ini dapat pula digunakan teknik SWOT, dengan melihat kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weaknesses*), kesempatan (*Opportunities*) dan ancaman (*Treath*).<sup>34</sup>

## 3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini petugas (*Community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya

## 4. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan (*community worker*) membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana.

## 5. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara petugas dan warga masyarakat, maupun kerja sama antar warga. Pertentangan antar kelompok warga juga dapat menghambat pelaksanaan suatu program ataupun kegiatan.

---

<sup>34</sup>Rukminto Adi, I.(2001).*Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan, Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Hal 173-174.

## 6. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga diharapkan agar terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal.<sup>35</sup>

## 7. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dapat dikatakan mandiri, tetapi jarang terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi batas atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyanggah dana yang dapat dan mau meneruskan.<sup>36</sup>

### 2.4 Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya penguatan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai

---

<sup>35</sup>Rukminto Adi, I.(2001).*Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan, Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Hal 174-176

<sup>36</sup>Rukminto Adi, I.(2001).*Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan, Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Hal 177.

proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya.<sup>37</sup>

Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Pemberdayaan wanita dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan wanita mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Dengan membekali wanita dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan wanita untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal.<sup>38</sup>

## **2.5 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

### **2.5.1 Istilah dan Definisi LSM**

Istilah LSM secara tegas didefinisikan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Masyarakat. Lampiran II dari Inmendagri

---

<sup>37</sup> Novian, Budhy. 2010. *Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan*. Artikel Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.

<sup>38</sup> Aritonang, Handra. (2000). *Pendidikan Hukum Bagi Wanita Sebagai Upaya Pemberdayaan Wanita dalam Perwujudan Hak Asasi Manusia*. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni. Hal 142-143.

menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Menurut Budairi dalam jurnal pemberdayaan lembaga yang dikutip oleh Khrisna Anggara menyebutkan bahwa LSM, dalam pengertian yang politis adalah organisasi keswadayaan masyarakat yang diorientasikan sebagai tandingan pemerintah, bahkan biasa diartikan berlawanan dan pesaing pemerintah. Itu sebabnya sebagian kalangan LSM lebih menyukai menyebutnya sebagai Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dari pada LSM. Sedangkan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Budairi mengatakan bahwa definisi LSM memang sulit dirumuskan, akan tetapi secara sederhana barangkali bisa diartikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>39</sup>

Menurut Peter Hannan dalam jurnal yang dikutip oleh Khrisna Anggara, seorang pakar ilmu-ilmu sosial dari Australia yang pernah melakukan penelitian tentang LSM di Indonesia pada tahun 1986, menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan ditingkat grassroots, biasanya melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal. Kelompok-kelompok ini biasanya mempunyai 20

---

<sup>39</sup> Anggara, Khrisna. 2008. *Pemberdayaan Lembaga*. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Hal 23.

sampai 50 anggota. Sasaran LSM adalah untuk menjadikan kelompok-kelompok ini berswadaya setelah proyeknya berakhir.<sup>40</sup>

Pengertian LSM di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagaimana dikatakan oleh M.M. Billah dalam jurnal pemberdayaan lembaga yang dikutip oleh Khrisna Anggara adalah pertama, orientasi mereka kepada penguatan kelompok-kelompok komunitas. Kedua, pada umumnya ada komitmen yang kuat terhadap cita-cita partisipasi rakyat. Ketiga, adanya satu komunitas LSM di Indonesia, dengan banyak hubungan silang antar pribadi dan kelembagaan yang saling mendukung terdapat pertukaran gagasan dan sumber daya.<sup>41</sup>

### **2.5.2 Peranan dan Klasifikasi LSM**

Menurut Ralston dalam jurnal pemberdayaan lembaga yang dikutip oleh Khrisna Anggara mencatat bahwa LSM dapat memainkan beberapa peranan dalam mendukung kelompok swadaya yang dikembangkan, termasuk diantaranya adalah :

1. Mengidentifikasi kebutuhan kelompok lokal dan taktik-taktik untuk memenuhi kebutuhan.
2. Melakukan mobilisasi dan agitasi untuk usaha aktif mengejar kebutuhan yang telah diidentifikasi tersebut.
3. Merumuskan kegiatan jangka panjang untuk mengejar sasaran-sasaran pembangunan lebih umum.
4. Menghasilkan dan memobilisasi sumber daya lokal atau eksternal untuk kegiatan pembangunan pedesaan.

---

<sup>40</sup> Anggara, Khrisna. 2008. *Pemberdayaan Lembaga*. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Hal 23-24.

<sup>41</sup> Ibid, Hal 24.

5. Peraturan dan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Tiap LSM biasanya tidak menjalankan semua fungsi ini, setidaknya pada waktu yang sama.<sup>42</sup>

Sedangkan Gaffar dalam jurnal pemberdayaan lembaga yang dikutip oleh Khrisna Anggara, mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dapat diberikan LSM, yaitu :

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat akar rumput (*Grassroots*) yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerjasama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga Internasional lainnya.
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.<sup>43</sup>

Menurut Korten dalam jurnal pemberdayaan lembaga yang dikutip oleh Khrisna Anggara, Identitas LSM tersebut dapat dilihat melalui pengelompokan atau pengklasifikasian LSM, yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi Sukarela (*Voluntary Organization atau VO*) yang melakukan misi sosial, terdorong oleh suatu komitmen kepada nilai-nilai yang sama.
2. Organisasi Rakyat (*People's Organization atau PO*) yang mewakili kepentingan anggotanya, mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab kepada anggota dan cukup mandiri.

---

<sup>42</sup> Anggara, Khrisna. 2008. *Pemberdayaan Lembaga, Program Pascasarjana*. Universitas Indonesia. Hal 24.

<sup>43</sup> Ibid. Hal 24.

3. Kontraktor Pelayanan Umum (*Public Service Contactor atau PSC*) yang berfungsi sebagai usaha tanpa laba, berorientasi pasar untuk melayani kepentingan umum.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerintah (*Government Non Government atau GONGO*) dibentuk oleh pemerintah dan berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah.<sup>44</sup>

## **2.6 Landasan Teori**

Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber untuk menganalisis masalah yang terdapat didalam penelitian yang dilakukan di Sekolah Perempuan. Berikut ialah penjelasan teori Max Weber:

### **Teori Tindakan Sosial Max Weber**

Pokok persoalan Weber sebagai pengemuka exemplar dari paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. dua hal itulah yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi. Inti tesis adalah “tindakan yang penuh arti” dari individu. Yang dimaksudnya dengan tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial.

Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada

---

<sup>44</sup> Ibid, Hal 24-28.



paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.<sup>45</sup>

Max Weber dalam memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang, berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau *in order to motive*.

Interaksi sosial merupakan perilaku yang bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial. Dimana tindakan sosial merupakan proses aktor terlibat dalam pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia, yang di tujuhan kepada perilaku orang lain, yang telah lewat, yang sekarang dan yang diharapkan diwaktu yang akan datang. tindakan sosial (*social action*) adalah tindakan yang memiliki makna subjektif (*a subjective meaning*) bagi dan dari aktor pelakunya. Tindakan sosial seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya. Baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun diam-diam, yang oleh pelakunya diarahkan pada tujuannya. Sehingga tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan tetapi yang memiliki pola dan struktur tertentudan makna tertentu.

---

<sup>45</sup> I.B Wirawan. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. (Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup). Hal 79.

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti, arti subjektif tersebut kedalam empat tipe. Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe, semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami:

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*)

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya : Seorang siswa yang sering terlambat dikarenakan tidak memiliki alat transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang ke sekolah lebih awal dan tidak terlambat. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain.

2. Tindakan Rasional Nilai (*Werk Rational*)

Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contoh : perilaku beribadah atau seseorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki.

### 3. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya: hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta atau sedang dimabuk asmara. Tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari luar yang bersifat otomatis sehingga bias berarti.

### 4. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Kedua tipe tindakan yang terakhir sering hanya menggunakan tanggapan secara otomatis terhadap rangsangan dari luar. Karena itu tidak termasuk kedalam jenis tindakan yang penuh arti yang menjadi sasaran penelitian sosiologi. Namun demikian pada waktu tertentu kedua tipe tindakan tersebut dapat berubah menjadi tindakan yang penuh arti sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dipahami.

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial, suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain (individu lainnya).

Meski tak jarang tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> <http://www.digilib.uinsby.ac.id>. *BAB II, Teori Tindakan Sosial Max Weber*. Diakses pada tanggal 20 Juni 2017, pukul 15:45 WIB.